

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dengan mayoritas penduduknya masih tinggal di daerah pedesaan. Meski begitu, tingkat pembangunan di desa masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kota. Oleh karena itu, peningkatan kualitas hidup masyarakat desa perlu menjadi perhatian utama. Salah satu tanda yang bisa digunakan untuk mengukur mutu hidup warga desa merupakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mengukur 3 ukuran utama ialah kesehatan, pendidikan, serta ekonomi. Walaupun IPM sudah diterapkan tingkatan, tetapi masih banyak yang kurang mengerti serta sulit untuk diterapkan secara luas pada tingkatan desa.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di desa cenderung lebih rendah dibandingkan dengan di kota, hal ini terkait dengan keterbatasan akses dan kualitas layanan dasar seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang masih terbatas di daerah pedesaan.

Dalam konteks tersebut, riset tentang IPM di desa mempunyai kepentingan yang besar. IPM di desa bisa memberikan cerminan tentang mutu hidup warga desa secara totalitas, tercantum dalam aspek Kesehatan, Pendidikan, serta ekonomi. Riset ini bisa menolong faktor-faktor yang mempengaruhi IPM di desa, sehingga bisa membagikan data untuk pemerintah serta warga desa dalam merancang program pembangunan yang lebih efektif dan efisien. IPM di desa juga dapat sangat membantu masyarakat desa agar mendapatkan tunjangan pembangunan secara menyeluruh, seperti perbandingan dari harapan hidup yang layak, pendidikan yang terkini, serta pelayanan dan asset Kesehatan yang lengkap.

Kementerian PPN/Bappenas (Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) memiliki tanggung jawab utama dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Kementerian ini merumuskan kebijakan pembangunan nasional, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Selain Kementerian PPN/Bappenas (Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga memiliki peran dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan untuk meningkatkan IPM. Kementerian terkait, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Ketenagakerjaan, serta pemerintah daerah, terlibat dalam program-program yang memengaruhi IPM, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi, dan perlindungan sosial.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, rata-rata IPM di desa di Indonesia sebesar 71,685 selama periode tahun 2019 hingga 2022, sedangkan rata-rata IPM di kota sebesar 76,76. Dari sisi dimensi, kesehatan menjadi dimensi yang paling rendah dengan rata-rata 66,08 di desa dan 73,02 di kota, diikuti dengan dimensi pendidikan dengan rata-rata 73,97 di desa dan 78,97 di kota, serta ekonomi dengan rata-rata 76,84 di desa dan 81,61 di kota.

Kondisi IPM di desa di Indonesia masih sangat bervariasi tergantung dari kondisi daerah masing-masing. Beberapa daerah yang masih memerlukan perhatian khusus dalam peningkatan IPM antara lain daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, daerah dengan keterbatasan akses ke layanan dasar, dan daerah yang terdampak bencana alam.

Dalam implementasi peningkatan IPM terdapat banyak faktor-faktor yang menghambat peningkatan IPM, yang pertama diantaranya adalah ketidak merataannya kemajuan IPM dalam daerah perkotaan dan pedesaan. Dalam beberapa kasus, daerah perkotaan biasanya memiliki IPM yang lebih tinggi dari daerah pedesaan, sehingga pembangunan peningkatan IPM yang hanya difokuskan kepada daerah perkotaan akan menyebabkan ketimpangan. Kedua yaitu keterbatasan sumber daya dimana dalam peningkatan IPM harus membutuhkan sumber daya yang cukup untuk mengembangkan sistem Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi. Dan biasanya didalam negara berkembang ini seringkali mendapatkan keterbatasan sumber daya yang cukup sehingga menyulitkan dalam peningkatan IPM yang signifikan. Ketiga yaitu adanya konflik dan ketidakstabilan politik pada daerahnya dimana dalam kasus ini akan mengakibatkan gangguan dalam peningkatan IPM. Keempat yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat setempat dimana pastinya dalam peningkatan IPM ini membutuhkan banyak partisipasi dari masyarakat dalam pembangunan. Kurangnya partisipasi masyarakat dapat menghambat peningkatan IPM karena kebijakan yang diambil mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Kelima yaitu dilihat dari perubahan iklim seperti air bersih, seperti air bersih, produksi pangan, dan Kesehatan masyarakat. Oleh karena itu perubahan iklim juga perlu di perhatikan dalam proses pembangunan dan kebijakan peningkatan IPM.

Pelayanan aparatur desa memegang peranan yang signifikan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tingkat desa. Hal ini tercermin melalui partisipasi aparatur desa dalam penyediaan akses dan peningkatan mutu layanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan. Melalui upaya ini, aparatur desa berperan penting dalam meningkatkan indikator kesehatan, seperti angka harapan hidup, serta indikator pendidikan, yang berdampak positif pada IPM. Selain itu, mereka juga dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan melalui program-program sosial dan bantuan ekonomi, serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, yang merupakan faktor penentu dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk desa. Oleh karena itu, pelayanan aparatur desa yang efektif juga memiliki peran dalam menjaga pengawasan dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik, yang berpotensi meningkatkan kualitas hidup dan IPM di tingkat desa.

Pemilihan Desa Sindanglaya sebagai lokus penelitian dalam evaluasi pelayanan aparatur pemerintah terkait peningkatan Indeks Pembangunan Manusia IPM memiliki justifikasi yang kuat. Desa Sindanglaya dapat mewakili sebagian besar desa di Indonesia, Desa Sindanglaya relevan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana pelayanan pemerintah desa memengaruhi IPM. Akses data dan partisipasi pihak lokal, termasuk pemerintah desa dan masyarakat, dapat memudahkan pengumpulan data dan analisis yang lebih komprehensif. Hasil penelitian yang dapat digeneralisasi dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan IPM di tingkat desa.

Di Indonesia, IPM diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 3 ayat (3) dalam UU tersebut menyebutkan bahwa pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu kriteria dalam menentukan besarnya nilai investasi yang dapat diusulkan untuk mendapatkan fasilitas penanaman modal.

Selain itu, dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dijelaskan bahwa IPM dihitung berdasarkan tiga komponen, yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, dan rata-rata pengeluaran per kapita per tahun. Komponen-komponen tersebut kemudian dihitung dan dikombinasikan untuk menghasilkan nilai IPM suatu daerah atau negara.

Dalam hal ini, IPM menjadi indikator penting yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam mengevaluasi kualitas hidup masyarakat dan mengidentifikasi daerah-daerah yang membutuhkan perhatian khusus dalam pengembangan pembangunan.

Oleh karena itu, perlu upaya yang lebih intensif dan terintegrasi dalam meningkatkan IPM di desa, seperti peningkatan kualitas layanan dasar, peningkatan keterampilan dan kapasitas masyarakat desa, serta pengembangan sektor ekonomi lokal.

Berikut adalah data Indeks Pembangunan Manusia di Desa Sindanglaya :

Tabel 1.3

Data IPM Desa Sindanglaya Tahun 2019 sampai 2022

NO	Elemen	2019	2020	2021	2022
1	Harapan Lama Sekolah	7,48	7,72	8,22	8,43
2	Angka Harapan Hidup	68,88	69,21	70,17	70,53
3	Rata-rata Lama Sekolah	8,81	9,02	9,20	9,41
4	Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan	78,23	81,17	81,33	81,85
5	Indeks Pembangunan Manusia	67,96	67,99	68,71	68,87

Sumber : Data Desa Sindanglaya Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung tahun 2022

Berdasarkan data diatas dapat diasumsikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Desa Sindanglaya terus mengalami peningkatan meskipun dalam jumlah yang relatif kecil setiap tahunnya. Peningkatan ini mencerminkan komitmen yang kuat dari pemerintah desa, masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk desa. Namun, di balik kenaikan tersebut, ada sejumlah permasalahan yang muncul setiap tahun, dan pandemi COVID-19 juga memiliki dampak yang signifikan.

Pada tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 melanda, Desa Sindanglaya menghadapi tantangan besar. Sektor ekonomi terkena dampak serius dengan banyaknya usaha lokal yang terpaksa tutup. Namun, pemerintah desa dengan cepat merespon dengan program bantuan ekonomi dan bantuan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga dapat memitigasi dampak ekonomi yang buruk. Meskipun peningkatan ekonomi di desa terhambat, tetapi dukungan ini membantu menjaga stabilitas.

Selama tahun 2021, masalah akses pendidikan menjadi sorotan. Proses pembelajaran jarak jauh menjadi tantangan, terutama di wilayah pedesaan dengan keterbatasan infrastruktur dan akses internet. Namun, pemerintah desa dan sekolah-sekolah setempat bersama-sama berupaya untuk memastikan bahwa pendidikan tetap berjalan, meskipun dalam format yang berbeda. Ini menunjukkan komitmen terhadap peningkatan IPM melalui pendidikan.

Pada tahun 2022, perhatian kembali tertuju pada upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Program pelatihan keterampilan dan dukungan untuk usaha

mikro dan kecil telah membantu meningkatkan pendapatan penduduk desa. Meskipun pandemi COVID-19 masih berdampak, adaptasi dan upaya kolaboratif telah memungkinkan desa untuk terus bergerak maju.

Peningkatan IPM di Desa Sindanglaya, walaupun kecil setiap tahunnya, adalah bukti dari tekad dan kerja keras bersama untuk mengatasi permasalahan dan hambatan, termasuk dampak pandemi. Hal ini menegaskan bahwa dengan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk desa dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lokal, pencapaian IPM yang lebih tinggi dapat dicapai di masa depan.

B. Identifikasi Masalah

Merujuk dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, adapun identifikasi masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia setiap tahunnya tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sindanglaya.
2. Ketidapahaman aparatur Desa Sindanglaya yang berpengaruh terhadap kesulitan perangkat desa dalam mengimplementasikan program-program untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

C. Rumusan Masalah

Merujuk pada identifikasi masalah diatas, untuk itu Peneliti merumuskan beberapa masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Strategi aparatur dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di desa Sindanglaya ?
2. Bagaimana Evaluasi pelayanan aparatur dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di desa Sindanglaya ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui layanan aparatur Desa Sindanglaya dalam meningkatkan IPM dan faktor apasaja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan peningkatan IPM di desa Sindanglaya. Disamping itu, peneliti membagi tujuan penelitian ini menjadi dua, diantaranya :

1. Untuk mengetahui strategi aparatur dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di desa Sindanglaya.

2. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi pelayanan aparatur dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di desa Sindanglaya.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini bahwa banyaknya manfaat teoritis yang dapat dipelajari, salah satunya yang dapat mengembangkan Ilmu Administrasi publik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Aparatur desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi dalam penerapan peningkatan IPM di desa.

- b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dalam hasil penelitian ini dapat memberikan memberikan informasi yang akurat tentang kondisi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat di suatu daerah. Informasi ini dapat membantu masyarakat untuk memperbaiki kondisi hidup mereka dan memberikan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik.

F. Kerangka Pemikiran

PPN/KEPALA BAPENAS memutuskan untuk membentuk Tim Prakarsa Strategis Pengembangan Indeks Pembangunan Manusia dan Masyarakat Indonesia untuk menganalisis lebih dalam tentang situasi pembangunan masyarakat yang komprehensif. Tim ini bertugas memberikan arahan kebijakan, merumuskan arah kebijakan, dan memantau pelaksanaan program pembangunan manusia dan masyarakat. Tim Prakarsa Strategis terdiri dari berbagai bagian, termasuk Penanggung Jawab, Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK), *Focus Group Discussion (FGD)*, dan Tenaga Pendukung. Tim ini memiliki tugas-tugas yang mencakup berbagai aspek pembangunan manusia dan masyarakat, seperti modal sosial, kohesi sosial, dan kepatuhan hukum. Semua biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim ini ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Aparatur desa di Sindanglaya mengalami kesulitan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di desa tersebut karena adanya ketidakpahaman dan kesulitan dalam mengimplementasikan IPM di tingkat desa. Mungkin aparatur Desa Sindanglaya tidak

sepenuhnya memahami bagaimana mengukur indikator-indikator ini secara akurat di tingkat desa atau cara melibatkan masyarakat dalam upaya peningkatan IPM. Selain itu, kesulitan implementasi juga bisa berkaitan dengan keterbatasan sumber daya dan akses terhadap layanan dasar, seperti layanan kesehatan dan pendidikan, yang dapat mempengaruhi peningkatan IPM. Untuk mengatasi masalah ini, aparatur desa Sindanglaya perlu mendapatkan pelatihan dan pendampingan yang memadai dalam mengukur, memahami, dan mengimplementasikan IPM dengan efektif di tingkat desa. Selain itu, kolaborasi dengan pihak terkait, seperti lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat lokal, juga dapat membantu mengatasi kesulitan ini dan mendukung upaya peningkatan IPM di Desa Sindanglaya.

Dalam konteks pelayanan publik, evaluasi sering dilakukan untuk menilai kualitas dan efektivitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Evaluasi tersebut dapat membantu pemerintah dalam melakukan perbaikan dan pengembangan pelayanan publik yang lebih baik di masa depan.

Model Servqual yang dikembangkan oleh (A. Zeithaml, 2012). Yang digunakan untuk mengukur kualitas evaluasi pelayanan dengan lima dimensi yaitu: keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), empati (empathy), dan bukti fisik (tangible).

Model Servqual dapat memberikan panduan untuk mengidentifikasi dan merancang strategi perbaikan dalam layanan aparatur desa, yang sesuai dengan tujuan evaluasi pelayanan. Sehingga, penggunaan Model Servqual akan memberikan landasan yang relevan dan efektif untuk menganalisis serta meningkatkan kualitas layanan aparatur desa guna mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia di Sindanglaya.

Dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), strategi yang diterapkan oleh aparatur desa Sindanglaya mencakup berbagai langkah, seperti peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Mereka juga aktif dalam mengadvokasi partisipasi warga dalam program-program pembangunan. Di samping itu, mereka terus mengevaluasi pelayanan yang diberikan, dengan berfokus pada dimensi keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik, untuk memastikan kualitas dan responsivitas pelayanan yang diberikan. Upaya ini diharapkan akan berkontribusi pada peningkatan IPM di Desa Sindanglaya melalui peningkatan aspek-aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Bagan 1.1

Kerangka Pemikiran

